



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 42 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/313/404.012/B/2021 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2022, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/313/404.012/B/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/313/404.012/B/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/834/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/313 /404.012/B/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/313/404.012/B/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, diubah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal, 5 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan  
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 42 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

DAFTAR PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

No	Dinas/Instansi	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT DAERAH	JOHAN KURNIAWAN, SE 19820421 201101 1 016	Pengurus Barang Pengguna
2.	SEKRETARIAT DPRD	HERI SUSANTO 19820511 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
3.	RSUD Dr. SOEROTO	ETIK PUJIARSIH, S.Sos 19811020 200901 2 004	Pengurus Barang Pengguna
4.	INSPEKTORAT	DONNY SULISTYO HARTONO 19760706 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	DADANG RACHMAT HIDAYAT 19750521 200701 1 020	Pengurus Barang Pengguna
6.	BADAN KEUANGAN	MARSUDIN 19760211 200501 1 005	Pengurus Barang Pengguna
7.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	HESTI DWI KUSUMANINGTYAS, SE 19690804 200901 2 002	Pengurus Barang Pengguna
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	HENKY DWI FIRMANSYAH 19830321 201001 1 005	Pengurus Barang Pengguna
9.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANASABILUL MUTTAQIEN 19810330 200701 1 003	Pengurus Barang Pengguna
10.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	BUDI UNTORO 19850208 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	HARI PURNAWAN 19780719 200901 1005	Pengurus Barang Pengguna

1	2	3	4
12.	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	ENJELLIYA DWI ARI. P 19850301 201001 2 002	Pengurus Barang Pengguna
13.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	ARI RUSLIANA NURKHOLIS 19780503 200901 1 002	Pengurus Barang Pengguna
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FEBRI ANSORI 19820201 200801 1 010	Pengurus Barang Pengguna
15.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	SUWIGNYO 19751104 200901 1 003	Pengurus Barang Pengguna
16.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	SOPINGI 19650213 198903 1 009	Pengurus Barang Pengguna
17.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	HERU DARYANTO 19800505 201001 1 007	Pengurus Barang Pengguna
18.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	HANANTO 19810328 200801 1 008	Pengurus Barang Pengguna
19.	DINAS KESEHATAN	EKO PRASETYO,A.Md.ARO 19790119 200312 1 007	Pengurus Barang Pengguna
20.	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	ARIF JULIANTO, A.Md 19830731 201001 1 018	Pengurus Barang Pengguna
21.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BASUKI RAHMAD 19680515 200701 1 042	Pengurus Barang Pengguna
22.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ENDANG SULISTYOWATI,S.Sos 19730422 200801 2 004	Pengurus Barang Pengguna
23.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	YUDI IRVAN KUSNANTO 19850330 200901 1 003	Pengurus Barang Pengguna
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DWI ARSO YUDIANTO 19780401 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
25.	DINAS SOSIAL	SARMI 19790616 200701 2 015	Pengurus Barang Pengguna

1	2	3	4
26.	DINAS PERHUBUNGAN	YENI HERDIANA, SE,MM 19761103 200801 2 009	Pengurus Barang Pengguna
27.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	NUR RIYADI, SE 19850613 201101 1 018	Pengurus Barang Pengguna
28.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SUMIRAN 19771005 200701 1 009	Pengurus Barang Pengguna
29.	KEC. SINE	UNTIN KUSRIANTI 19781020 200801 2 023	Pengurus Barang Pengguna
30.	KEC. NGRAMBE	ANGGORO DISWANOTO 19831226 200901 1 004	Pengurus Barang Pengguna
31.	KEC. JOGOROGO	SIGIT ANDRIANTO 19780706 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
32.	KEC. KENDAL	SUROSO 19800620 201001 1 004	Pengurus Barang Pengguna
33.	KEC. GENENG	SUCI WAHYUNI 19840922 201001 2 001	Pengurus Barang Pengguna
34.	KEC. KWADUNGAN	YULIA DWI LESTARI 19830709 200901 2 004	Pengurus Barang Pengguna
35.	KEC. KARANGJATI	LUZYANA RETNANINGTIAS 19850322 201001 2 002	Pengurus Barang Pengguna
36.	KEC. BRINGIN	DIDIK BUSTANUL MA'ARIF 19780620 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
37.	KEC. PADAS	SUTRISNO 19761002 200901 1 004	Pengurus Barang Pengguna
38.	KEC. NGAWI	ARIF DWI FITRIYANTO 19840720 200901 1 008	Pengurus Barang Pengguna
39.	KEC. PARON	ENI SULIS SETIYOWATI 19840306 201001 2 001	Pengurus Barang Pengguna
40.	KEC. KEDUNGGALAR	AGUS PRASETYO 19830810 200801 1 016	Pengurus Barang Pengguna

1	2	3	4
41.	KEC. PITU	MURDIYANTO 19840512 201001 1 002	Pengurus Barang Pengguna
42.	KEC. WIDODAREN	DIYAH AYU NURWARDANY 19851006 201001 2 001	Pengurus Barang Pengguna
43.	KEC. MANTINGAN	GUNAWAN 19800827 200801 1 015	Pengurus Barang Pengguna
44.	KEC. KARANGANYAR	SHOFI NUR HIKMAH 19810117 200701 2 004	Pengurus Barang Pengguna
45.	KEC. GERIH	SUHARNO 19760426 200701 1 009	Pengurus Barang Pengguna
46.	KEC. KASREMAN	DHADHANG WAHYU WIBOWO 19791216 200901 1 004	Pengurus Barang Pengguna
47.	KEC. PANGKUR	YULIANAWATI 19850308 201001 2 001	Pengurus Barang Pengguna

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO